

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi sekarang, dibutuhkan adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Hal ini terjadi karena jumlah penduduk yang semakin besar dan persaingan yang semakin ketat. Oleh karena itu dunia pendidikan dituntut untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan dan dapat menciptakan manusia yang berkualitas dan berprestasi tinggi.

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia. Pendidikan sangat berperan membentuk baik atau buruknya pribadi manusia menurut ukuran normative. Menyadari akan hal tersebut, pemerintah sangat serius menangani bidang pendidikan, sebab dengan sistem pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu menyesuaikan diri untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pendidikan merupakan salah satu upaya dari pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan kunci utama bagi keberhasilan pembangunan yang mempengaruhi semua bidang kehidupan. Menyadari akan hal tersebut, pemerintah sangat serius menangani bidang pendidikan. Melalui pendidikan diharapkan akan melahirkan generasi-generasi yang berkualitas memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mampu menyesuaikan diri untuk hidup bermasyarakat dan keterampilan.

Reformasi pendidikan merupakan respon terhadap perkembangan tuntutan global sebagai suatu upaya untuk mengadaptasikan sistem pendidikan yang mampu mengembangkan sumber daya manusia untuk memenuhi tuntutan zaman yang sedang berkembang. Melalui reformasi pendidikan, pendidikan harus berwawasan masa depan yang memberikan jaminan bagi perwujudan hak-hak azasi manusia untuk mengembangkan seluruh potensi dan prestasinya secara optimal guna kesejahteraan hidup di masa depan.

Pendidikan pada dasarnya merupakan suatu usaha pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), walaupun usaha pengembangan SDM tidak hanya dilakukan melalui pendidikan khususnya pendidikan formal (sekolah). Tetapi sampai saat ini, pendidikan masih dipandang sebagai sarana dan wahana utama untuk pengembangan SDM yang dilakukan dengan sistematis, programatis, dan berjenjang.

Upaya kearah itu, sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB 1 Pasal 1 dikatakan bahwa :

“ Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara “.

Dari kutipan diatas bahwa keberhasilan pembangunan di berbagai bidang akan berhasil hanya melalui pendidikan untuk mengembangkan potensi-potensi diri dalam rangka meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang handal, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, tanggung jawab, mandiri, cerdas dan terampil.

Pendidikan sebagai media untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Mendiknas Nomor 29 Tahun 2005 membentuk Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M), sebagai pengganti institusi pelaksana akreditasi sekolah yang lama yaitu Badan Akreditasi Sekolah Nasional (BASNAS). Pelaksanaan akreditasi oleh BAN-S/M didasarkan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya pasal 60, serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP.

Hal tersebut dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB XVI Pasal 60, tentang akreditasi yang berbunyi:

1. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
2. Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik;
3. Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka;
4. Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa akreditasi memberi informasi terhadap sebuah sekolah atau sebuah program dalam suatu sekolah telah atau belum memenuhi standar kelayakan dan kinerja yang telah ditentukan, serta membantu sekolah melakukan evaluasi diri dan menentukan kebijakan sendiri dalam upaya peningkatan mutu.

Seperti yang tercantum dalam Permendiknas Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) Pasal 1 kriteria dan perangkat akreditasi SD/MI bahwa :

“Kriteria dan perangkat akreditasi sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI) meliputi instrumen akreditasi, petunjuk teknis pengisian instrumen akreditasi, instrumen pengumpulan data dan informasi pendukung akreditasi, serta teknik penskoran dan pemeringkatan hasil akreditasi”.

Upaya meningkatkan mutu pendidikan secara nasional merupakan salah satu program yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Upaya ini diarahkan agar setiap lembaga pendidikan selalu berupaya untuk memberikan jaminan mutu layanannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Mutu layanan adalah jaminan bahwa proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan yang seharusnya terjadi dan sesuai pula dengan yang diharapkan. Apabila setiap satuan pendidikan selalu berupaya untuk memberi jaminan mutu dan upaya ini secara terus menerus, maka diharapkan mutu pendidikan secara nasional akan terus meningkat. Peningkatan mutu pendidikan ini akan berdampak pada peningkatan mutu sumber daya manusia secara nasional. Hal ini sangat penting mengingat dewasa ini kita dihadapkan pada berbagai kesempatan dan tantangan, baik yang bersifat nasional maupun global,

sedangkan berbagai kesempatan dan tantangan itu hanya dapat diraih dan dijawab apabila sumber daya manusia yang dimiliki bermutu tinggi.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 ketentuan umum Pasal 1 Nomor 21 akreditasi merupakan kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Akreditasi merupakan alat regulasi diri (*self-regulation*) agar sekolah mengenal kekuatan dan kelemahan serta melakukan upaya yang terus menerus untuk meningkatkan kekuatan dan memperbaiki kelemahannya. Dalam hal ini akreditasi memiliki makna proses pendidikan. Di samping itu akreditasi juga merupakan penilaian hasil dalam bentuk sertifikasi formal terhadap kondisi suatu sekolah yang telah memenuhi standar layanan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa proses akreditasi dalam makna proses adalah penilaian dan pengembangan mutu suatu sekolah secara berkelanjutan. Akreditasi dalam makna hasil menyatakan pengakuan bahwa suatu sekolah telah memenuhi standar kelayakan pendidikan yang telah ditentukan.

Berdasarkan pemikiran tersebut dan untuk dapat membandingkan serta memetakan mutu dari setiap satuan pendidikan, perlu dilakukan akreditasi bagi setiap lembaga dan program pendidikan. Proses akreditasi ini dilakukan secara berkala dan terbuka dengan tujuan membantu dan memberdayakan satuan pendidikan agar mampu mengembangkan sumber dayanya dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Dengan menggunakan instrumen akreditasi yang komprehensif dan dikembangkan berdasarkan standar mutu yang ditetapkan

diharapkan profil mutu sekolah dapat dipetakan untuk kepentingan peningkatan mutu sekolah oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Pengaruh akreditasi sekolah terhadap peningkatan mutu sekolah, maka hasil akreditasi merupakan dorongan bagi sekolah untuk selalu meningkatkan mutu sekolahnya dan bekerja keras untuk memberi layanan yang terbaik bagi peserta didiknya.

Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan nasional secara bertahap ke arah yang diharapkan sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu dilakukan pengembangan dan sekaligus membangun sistem pengendalian mutu pendidikan melalui empat program yang terintegrasi, yaitu standarisasi, evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Standarisasi pendidikan haruslah dimaknai sebagai upaya penyamaan arah pendidikan secara nasional yang memiliki keluasaan dan sekaligus keluwesan dalam implementasinya. Standar pendidikan harus dijadikan acuan oleh pengelola pendidikan, yang menjadi pendorong tumbuhnya inisiatif dan kreativitas dalam mencapai standar nasional yang ditetapkan. Akreditasi sekolah, baik terhadap kelayakan maupun kinerja, dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional. Sebagai implikasinya, hanya sekolah yang telah terakreditasi yang berhak mengeluarkan ijazah atau sertifikat kelulusan.

Sampai dengan tahun 2010, jumlah Sekolah Dasar (SD) di kota Sukabumi adalah sebagai berikut :

- Tahun 2010 sebanyak 122 Sekolah Dasar yang terdiri dari 111 Sekolah Dasar Negeri dan 11 Sekolah Dasar Swasta. (sumber : Bidang Prapendas Dinas Pendidikan kota Sukabumi).
- Daftar jumlah sekolah yang diakreditasi tahun 2009

No	Peringkat Akreditasi	Jumlah
1	A	2
2	B	30
3	C	3
Jumlah		35

Tabel 1.1
Daftar jumlah sekolah yang diakreditasi tahun 2009

Sementara itu untuk tahun 2010 pelaksanaan akreditasi sekolah dasar telah dilakukan akan tetapi untuk hasilnya belum diketahui sampai saat ini. Sehingga bila saya prediksi kota Sukabumi telah menyelesaikan hampir kurang lebih 60 % mengakreditasi sekolah dasar di lingkungan Dinas Pendidikan kota Sukabumi.

Dengan demikian penelitian tentang dampak proses akreditasi sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan penting untuk dilakukan di lingkungan Dinas Pendidikan kota Sukabumi. Bertolak dari apa yang dipaparkan di atas maka penulis bermaksud untuk mengadakan suatu penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul sebagai berikut : ***“Kontribusi Akreditasi Sekolah Terhadap Peningkatan Mutu Sekolah Pada Sekolah Dasar Se Kota Sukabumi”***.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2010:56). Dalam penelitian ini masalah yang akan dibahas adalah dampak proses akreditasi sekolah terhadap peningkatan mutu sekolah pada Sekolah Dasar se-kota Sukabumi.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis dapat merumuskan masalah untuk dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Gambaran Akreditasi Sekolah Dasar di Kota Sukabumi?
2. Bagaimana Gambaran Peningkatan Mutu Sekolah di Sekolah Dasar se-kota Sukabumi?
3. Bagaimana Kontribusi Akreditasi Sekolah Terhadap Peningkatan Mutu Sekolah Pada Sekolah Dasar se-Kota Sukabumi?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah memperoleh gambaran yang jelas tentang kontribusi akreditasi sekolah terhadap peningkatan mutu sekolah pada Sekolah Dasar se-kota Sukabumi.

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui gambaran mengenai akreditasi sekolah di Kota Sukabumi.

- b. Untuk mengetahui gambaran mengenai peningkatan mutu sekolah pada Sekolah Dasar se-kota Sukabumi.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis besaran kontribusi akreditasi sekolah terhadap peningkatan mutu sekolah pada Sekolah Dasar se-kota Sukabumi.

D. Anggapan Dasar

Menurut Winarno Surakhmad, bahwa anggapan dasar atau postulat itu adalah sebuah titik tolak yang kebenarannya diterima oleh penyelidik. (Suharsimi Arikunto, 2002:58).

Anggapan dasar atau asumsi yang melandasi penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Akreditasi adalah pengakuan terhadap lembaga pendidikan yang diberikan oleh badan yang berwenang setelah dinilai bahwa lembaga itu memenuhi syarat kebakuan atau kriteria tertentu atau pengakuan oleh suatu jawaban tertentu adanya wewenang seseorang untuk melaksanakan atau menjalankan tugasnya (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1991:34).
- b. Akreditasi sekolah adalah kegiatan penilaian (*assesmen*) sekolah secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi diri dan evaluasi eksternal (visitasi) untuk menentukan kelayakan dan kinerja sekolah (Akhmad Sudrajat :2008).
- c. Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan atau satuan

pendidikan (PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 86 ayat 1).

- d. Mutu adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya (*Feigenbaum*, 1986 : 7) yang dikutip oleh Nasution.
- e. Peningkatan mutu sekolah adalah sekolah yang dapat memuaskan pelanggannya, baik pelanggan internal maupun eksternal sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan.

E. Hipotesis Penelitian

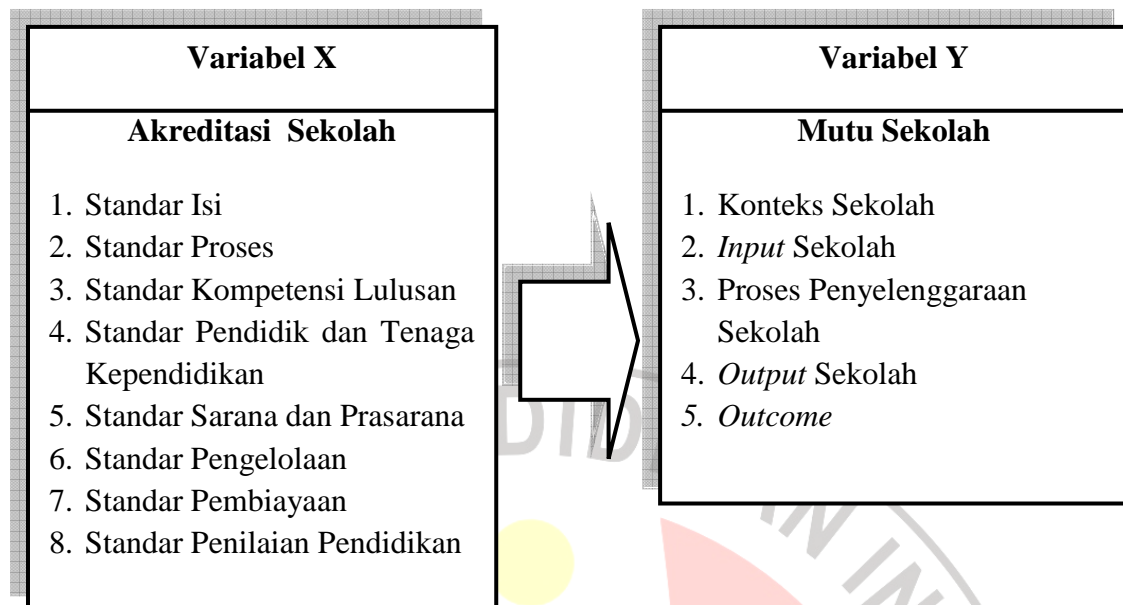
Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang baru dibuktikan kebenarannya. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto, (1996:67) bahwa : “Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul”.

Sementara itu menurut Sugiyono (2010:96) menjelaskan bahwa :

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan semestara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat diartikan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian , belum jawaban yang empiric dengan data”.

Berdasarkan definisi diatas, maka hipotesis dari penelitian ini adalah :”
terdapat pengaruh positif antara kontribusi akreditasi sekolah terhadap peningkatan mutu sekolah pada Sekolah Dasar se-kota Sukabumi”.

Adapun variabel dari hipotesis di atas dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.1
Hubungan antara variabel penelitian

F. Metodologi Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian, metode penelitian diperlukan untuk mengarahkan penelitian agar mencapai tujuan secara efektif. Sugiyono (2010:3) mengartikan bahwa : “Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif karena penelitian ini menyangkut peristiwa yang sedang terjadi sekarang. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Moh. Ali (1985:120) bahwa :

Metode penelitian deskriptif digunakan untuk berupaya memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang. Dilakukan dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan, klasifikasi, analisis atau pengolahan data, membuat kesimpulan dan laporan dengan tujuan utama untuk membuat penggambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu deskripsi.

Sementara itu yang dimaksud dengan pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian dengan cara mengukur indikator-indikator variabel penelitian sehingga diperoleh gambaran diantara variabel-variabel tersebut.

Adapun alat penelitian yang digunakan penulis dalam memudahkan mengumpulkan data yaitu dengan menyebarkan angket dan studi literatur.

Dengan demikian tujuan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif adalah untuk menjelaskan sesuatu situasi yang hendak diteliti dengan dukungan studi kepustakaan sehingga lebih memperkuat analisa peneliti dalam membuat suatu kesimpulan.

G. Lokasi, Populasi, dan Sampel

1. Lokasi

Yang menjadi lokasi dilaksanakannya penelitian ini yaitu seluruh Sekolah Dasar (SD) se-Kota Sukabumi, baik negeri maupun swasta yang telah diakreditasi pada tahun 2009.

2. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek / subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010:117). Populasi dalam penelitian ini adalah Sekolah Dasar (SD) yang

diakreditasi pada tahun 2009 baik itu negeri atau swasta yang berjumlah 35 sekolah.

3. Sampel

Menurut Sugiyono (2010:118), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dalam menentukan jumlah sampel menurut Sugiyono (2010:119) bahwa :

Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Untuk itu sampel dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).

Perhitungan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan sampel population yaitu teknik pengambilan sampel apabila semua populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sesuai dengan pendapat Adimiharja (Setiawati, 2006:13) bahwa “secara ideal dalam penelitian, kita meneliti seluruh anggota populasi”. Maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sampel Kepala Sekolah sebanyak 35 orang, Guru 35 orang dan komite Sekolah sebanyak 35 orang di SD se-Kota Sukabumi. Jadi jumlah keseluruhan responden yang dijadikan untuk penelitian berjumlah 105 responden.